

OMBUDSMAN HARAP KUOTA POLWAN DITAMBAH

Rabu, 28 Juli 2021 - Yohanis Tri Christyanto Kora

MANOKWARI, papuabaratnews.co - Ombudsman Provinsi Papua Barat berharap Markas Besar Polri dapat menambah kuota untuk Polisi Wanita (Polwan) pada proses perekrutan masa mendatang, agar kuota Polwan sebanding dengan kuota Polisi Laki-laki (Polki).

"Supaya ada kesetaraan gender," ucap Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Ombudsman Papua Barat Yunus Kaipman, saat dikonfirmasi awak media belum lama ini.

Ia menjelaskan, kuota Polwan dalam penerimaan Bintara jalur armasi atau Otonomi Khusus (Otsus) hanya 100 orang dan masing-masing kabupaten/kota hanya 6 orang. Sementara animo generasi muda Papua Barat yang ingin menjadi Polwan begitu tinggi. "Padahal animo Polwan banyak sekali," ujar Yunus.

Ia menyarankan, pemerintah provinsi perlu memperjuangkan semangat anak-anak Papua yang berkeinginan menjadi Polwan, namun terbentur dengan keterbatasan kuota. Ke depannya, pemerintah kabupaten/kota juga harus memiliki format usulan kuota baik Polki maupun Polwan. Hal ini dapat mencegah aksi protes dari kasus yang gagal.

Setelah itu, usulan kuota dari pemerintah daerah akan disampaikan oleh panitia daerah (Panda) ke Markas Besar Polri di Jakarta, sebelum disetujui Mabes. "Perempuan juga sangat dibutuhkan untuk ditempatkan di Polres-polres," ujarnya.

Ombudsman selaku bagian dari tim pengawas eksternal, menilai seluruh proses penerimaan Bintara Polri baik jalur armasi Otsus ataupun reguler berjalan transparan, berintegritas dan profesional.

Sementara itu Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Dedaida menuturkan, pihaknya bersama pemerintah daerah akan mendorong agar kedepannya kuota tersebut ditambah. "Supaya kuantanya ditambah, baik untuk Polwan maupun Polki" ujar Dedaida.

Apabila usulan penambahan kuota itu disetujui oleh Mabes Polri, maka DPR Papua Barat siap mendorong penambahan anggaran untuk kuota Bintara jalur Otsus. "DPR siap dari sisi anggaran," jelas Dedaida. (PB15)